

### **BAB III**

#### **SIKAP UNI EROPA TERKAIT PERMOHONAN KEANGGOTAAN**

##### **TURKI TAHUN 2005-2016**

Dalam bab III ini akan menjelaskan mengenai sikap Uni Eropa terkait permohonan keanggotaan Turki. Ditandai dengan permohonan Turki menjadi anggota pada tahun 1987 saat *European Economic Community* (EEC) (Rahim, 2013, hal. 214-215), kemudian Uni Eropa meningkatkan status Turki menjadi ‘negara calon anggota’ pada tahun 2005 sekaligus membuka perjanjian negosiasi keanggotaan. Dalam negosiasi tersebut Uni Eropa memberikan 35 prasyarat kepada Turki. Saat ini Turki baru menyelesaikan 16 bab dari total 35 bab yang diajukan Uni Eropa. Ketika proses negosiasi yang cukup alot antara Uni Eropa dan Turki, ada beberapa negara anggota Uni Eropa yang memberikan dukungannya agar Turki dapat bergabung dalam integrasi Uni Eropa. (EU-Turkey Intergovernmental Conference, 2015)

#### **A. Permohonan Turki Menjadi Anggota Uni Eropa**

Pada tahun 1959, Turki adalah salah satu negara pertama yang bekerjasama dengan *European Economic Community* (EEC). Kerjasama ini diwujudkan dalam ‘*association agreement*’ atau disebut sebagai *Ankara Agreement*, yang ditandatangani pada 12 September 1963. Salah satu unsur penting dalam membangun ‘*customs union*’ sehingga Turki dapat melakukan perdagangan barang dan produk-produk pertanian dengan negara anggota EEC tanpa pembatasan. (Delegation of the European Union to Turkey, 2008)

Berikut ini adalah tahapan permohonan keanggotaan Turki menjadi anggota

Uni Eropa:

<b>Waktu</b>	<b>Peristiwa</b>
14 April 1987	Turki mengajukan permohonan keanggotaan penuh <i>European Economic Community</i> .
Tahun 1993	Uni Eropa dan Turki memulai negosiasi ' <i>customs union</i> '. Pengaturan integrasi yang lebih kuat terkait ekonomi Turki dengan Eropa.
1 Januari 1996	Perjanjian ' <i>customs union</i> ' antara Turki dan Uni Eropa mulai berlaku.
Desember 1999	Dalam <i>Helsinki Summit</i> , Dewan Eropa memberikan Turki status negara calon anggota Uni Eropa. Hal itu mengikuti rekomendasi Komisi Eropa dalam laporan reguler kedua Turki.
8 Maret 2001	Dewan Eropa mengadopsi <i>Accession Partnership</i> antara Uni Eropa dan Turki, untuk memberikan jalan dalam proses akses Turki ke Uni Eropa.
19 Maret 2001	Pemerintah Turki mengadopsi NPAA ( <i>the National Programme for the Adoption of the Acquis</i> ), an <i>acquis</i> berarti hukum yang berlaku di Uni Eropa. Hal ini mencerminkan pelaksanaan <i>Accession Partnership</i> .
September 2001	Dalam <i>Copenhagen Summit</i> , Dewan Eropa memutuskan untuk meningkatkan secara signifikan dukungan finansial Uni Eropa melalui <i>Pre-Accession Instrument</i> (IPA).
17 Desember 2004	Dewan Eropa memutuskan untuk membuka pembicaraan terkait keanggotaan dengan Turki.
3 Oktober 2005	Negosiasi akses Turki ke Uni Eropa telah dibuka.

(Delegation of the European Union to Turkey, 2008)

Pada 3 Oktober 2005, Turki dan Uni Eropa mencapai kesepakatan dan memulai pembicaraan penerimaan anggota. Pertemuan tersebut berlangsung di Luxembourg, yang dihadiri oleh para pemimpin dari 25 negara anggota Uni Eropa dan Menteri Luar Negeri Turki Abdullah Gul. (Harian Kompas- Internasional, 2005) Dalam pertemuan tersebut menghasilkan resolusi tak terbatas yang mensyaratkan Turki untuk menandatangani *Adoption Protocol* yang memperluas keberadaan *Association Agreement* dengan Uni Eropa terhadap seluruh negara anggota Uni Eropa. (Sumantri, 2012, hal. 98)

Tahap pertama dari hasil perundingan 3 Oktober 2005 yakni segera dimulainya proses *screening*. Pertemuan yang membahas terkait *screening* tersebut selesai pada Oktober 2006. Dari *screening* itulah Komisi Eropa akan mempersiapkan laporan pemeriksaan (*screening reports*) untuk tiap bab negosiasi. (Delegation of the European Union to Turkey, 2006)

## **B. Prasyarat bagi Turki untuk Bergabung di Uni Eropa**

Dalam kebijakan perluasan keanggotaan Uni Eropa dengan negara-negara yang saat ini mengajukan permohonan ke Uni Eropa. Ada *conditions for membership* yang ketat untuk memastikan bahwa negara calon anggota nantinya mampu memenuhi kewajiban sebagai negara anggota Uni Eropa. Termasuk untuk memenuhi semua standar dan peraturan di dalam Uni Eropa. Hal itu untuk tujuan proses akses negosiasi yang terdiri dari 130.000 halaman yang dikelompokkan dalam 35 bidang kebijakan yang berbeda. (European Commission- Enlargement Policy, 2015)

Prasyarat 35 bab tersebut antara lain sebagai berikut:

Chapter 1	Free movement of goods
Chapter 2	Freedom of movement for workers
Chapter 3	Right of establishment and freedom to provide services
Chapter 4	Free movement of capital
Chapter 5	Public procurement
Chapter 6	Company law
Chapter 7	Intellectual property law
Chapter 8	Competition policy
Chapter 9	Financial services
Chapter 10	Information society and media
Chapter 11	Agriculture and rural development
Chapter 12	Food safety, veterinary and phytosanitary policy
Chapter 13	Fisheries
Chapter 14	Transport policy
Chapter 15	Energy
Chapter 16	Taxation
Chapter 17	Economic and monetary policy
Chapter 18	Statistics
Chapter 19	Social policy and employment
Chapter 20	Enterprise and industrial policy
Chapter 21	Trans-European networks
Chapter 22	Regional policy and coordination of structural instruments
Chapter 23	Judiciary and fundamental rights
Chapter 24	Justice, freedom and security
Chapter 25	Science and research
Chapter 26	Education and culture
Chapter 27	Environment
Chapter 28	Consumer and health protection
Chapter 29	Customs union
Chapter 30	External relations
Chapter 31	Foreign, security and defence policy
Chapter 32	Financial control
Chapter 33	Financial and budgetary provisions
Chapter 34	Institutions
Chapter 35	Other issues

(European Commission- Enlargement Policy, 2015)

Pasca dimulainya negosiasi keanggotaan pada Oktober 2005, bab pertama yang dinegosiasikan yakni bab ke 25 terkait ilmu pengetahuan dan penelitian. Bab ke 25 dibuka dan ditutup sementara waktu pada tanggal 12 Juni 2006. Pada bulan November 2006, Uni Eropa menyatakan keprihatinan atas kebijakan Turki dalam pembatasan pergerakan barang, termasuk pembatasan sarana transportasi. Kekecewaan Uni Eropa tersebut dikarenakan Turki telah melakukan penandatanganan *Additional Protocol* dalam *Ankara Agreement*. (Delegation of the European Union to Turkey, 2006)

Perkembangan dalam pemenuhan setiap bab negosiasi Turki ke Uni Eropa adalah ketika Dewan Eropa memutuskan untuk menunda negosiasi delapan bab pada 14-15 Desember 2006, delapan bab tersebut antara lain:

1. Chapter 1 (*Free movement of goods*)
2. Chapter 3 (*Right of establishment and freedom to provide services*)
3. Chapter 9 (*Financial services*)
4. Chapter 11 (*Agriculture and rural development*)
5. Chapter 13 (*Fisheries*)
6. Chapter 14 (*Transport policy*)
7. Chapter 29 (*Customs union*)
8. Chapter 30 (*External relations*)

Dewan Eropa memutuskan bahwa delapan bab di atas akan ditutup sementara waktu sampai Turki dapat memenuhi komitmen berdasarkan *Additional Protocol* untuk perjanjian Uni Eropa-Turki (*EU-Turkey*

*Association Agreement*). Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa proses negosiasi diblokir. Karena pada Januari 2007, negosiasi kembali berjalan pada bab-bab yang tidak ditangguhkan. (Delegation of the European Union to Turkey, 2006) Pada tahun 2007 setidaknya ada lima bab negosiasi yang dibuka, antara lain:

1. *Chapter 20 (Enterprise and industrial policy)* dibuka pada 29 Maret 2007
2. *Chapter 18 (Statistic)* dibuka pada 26 Juni 2007
3. *Chapter 32 (Financial control)* dibuka pada 26 Juni 2007
4. *Chapter 21 (Trans-European networks)* dibuka pada 19 Desember 2007
5. *Chapter 28 (Consumer and health protection)* dibuka pada 19 Desember 2007

(European Commission- Enlargement Policy, 2015)

Pada tahun 2008, ada empat bab negosiasi yang dibuka antara lain:

1. *Chapter 6 (Company law)* dibuka pada 17 Juni 2008
2. *Chapter 7 (Intellectual property rights)* dibuka pada 17 Juni 2008
3. *Chapter 4 (Free movement of capital)* dibuka pada 19 Desember 2008
4. *Chapter 10 (Information society and media)* dibuka pada 19 Desember 2008

(European Commission- Enlargement Policy, 2015)

Pada tahun 2009, ada dua bab negosiasi yang dibuka antara lain *Chapter 16 (Taxation)* dibuka pada 30 Juni 2009 dan *Chapter 27 (Environment)* dibuka pada 21 Desember 2009. (European Commission- Enlargement Policy, 2015)

Pada tahun 2010, ada satu bab negosiasi yang dibuka yakni *Chapter 12 (Food safety, veterinary and phytosanitary policy)* yang dibuka pada 30 Juni 2010. (European Commission- Enlargement Policy, 2015)

Pada tahun 2013, ada satu bab negosiasi yang dibuka yakni *Chapter 22 (Regional policy and coordination of structural instruments)* yang dibuka pada 5 November 2013. (European Commission- Enlargement Policy, 2015)

Upaya Turki untuk memenuhi setiap prasyarat yang diberikan oleh Uni Eropa terus dilaksanakan. Hingga untuk pertama kalinya dalam dua tahun tersebut Uni Eropa melakukan pembukaan bab baru dalam proses negosiasi Turki. Hal ini disampaikan oleh Jean Asselborn Menteri Luar Negeri Luxembourg dan Urusan Eropa, bahwa pada 14 Desember 2015 Menteri Luar Negeri dari 28 negara anggota Uni Eropa menyetujui pembukaan bab baru yang berfokus pada kebijakan ekonomi dan moneter. Pembukaan bab 17 ini menjadikan Turki memasuki babak baru menyelesaikan 15 bab dari total 35 bab negosiasi. (EU-Turkey Intergovernmental Conference, 2015)

Kemudian pada tanggal 30 Juni 2016, pertemuan kedua belas konferensi akses dengan Turki pada tingkat Menteri yang diadakan di Brussels. Konferensi tersebut membahas terkait pembukaan negosiasi bab 33 tentang ketentuan keuangan dan anggaran. Bab ini mencakup aturan

mengenai sumber keuangan yang diperlukan untuk pendanaan anggaran Uni Eropa. Konferensi tersebut dipimpin oleh Bert Koenders selaku Menteri Luar Negeri Netherlands dan Komisi Eropa diwakili oleh Johannes Hahn, selaku komisaris perluasan dan negosiasi Uni Eropa. (European Council and Council of the European Union, 2016) Hingga saat ini, Turki telah menyelesaikan 16 bab negosiasi dari total 35 bab negosiasi. Satu bab dari 16 bab negosiasi ditutup sementara waktu. (European Commission- Enlargement Policy, 2015)



<b>TURKEY</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
<b>State of play: 08 January 2016</b>	Negotiations opened	Negotiations closed
1 - Free movement of goods		
2 - Freedom of movement for workers		
3 - Right of establishment and freedom to provide services		
4 - Free movement of capital	19 December 2008	
5 - Public procurement		
6 - Company law	17 June 2008	
7 - Intellectual property law	17 June 2008	
8 - Competition policy		
9 - Financial services		
10 - Information society and media	19 December 2008	
11 - Agriculture and rural development		
12 - Food safety, veterinary and phytosanitary policy	30 June 2010	
13 - Fisheries		
14 - Transport policy		
15 - Energy		
16 - Taxation	30 June 2010	
17 - Economic and monetary policy	14 December 2015	
18 - Statistics	26 June 2007	
19 - Social policy and employment		
20 - Enterprise and industrial policy	29 March 2007	
21 - Trans-European networks	19 December 2007	
22 - Regional policy and coordination of structural instruments	5 November 2013	
23 - Judiciary and fundamental rights		
24 - Justice, freedom and security		
25 - Science and research	12 June 2006	12 June 2006
26 - Education and culture		
27 - Environment	21 December 2009	
28 - Consumer and health protection	19 December 2007	
29 - Customs union		
30 - External relations		
31 - Foreign, security and defence policy		
32 - Financial control	26 June 2007	
33 - Financial and budgetary provisions		
34 - Institutions		
35 - Other issues		

(European Commission- Enlargement Policy, 2015)

### **C. Negara Uni Eropa Pendukung Integrasi Turki di Uni Eropa**

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Eurobarometer menyatakan bahwa dukungan keanggotaan Turki masih dominan tetapi telah menurun, 42% responden masih menganggap bahwa keanggotaan negara mereka akan menjadi hal yang baik. Keyakinan bahwa keanggotaan di Uni Eropa akan menjadi keuntungan bagi Turki masih 48% berbanding 36%, tetapi dukungan ini telah menurun 4% sejak 2010. Meskipun sedikit menurun, mayoritas sebanyak 59% responden di Turki masih mendukung negara mereka dalam keanggotaan di Uni Eropa. Sedangkan mayoritas di lima negara anggota Uni Eropa juga mendukung keanggotaan Turki seperti Rumania (61%), Hungaria (52%), Swedia (52%), Slovenia (48%), dan Lithuania (41%). (Eurobarometer 74 Autumn, 2011) Dari survei di atas, penulis akan menguraikan beberapa negara anggota Uni Eropa yang mendukung keanggotaan Turki di Uni Eropa.

#### **1. Portugal**

Pada 28 Juni 2007, Portugal masih menjadi presiden Uni Eropa yang menyatakan menolak atas permintaan Prancis untuk mengadakan perdebatan besar di tahun 2007 terkait Uni Eropa dan masa depan keanggotaan Turki. Sekretaris Negara Portugal dan Urusan Eropa Manuel Lobo Antunes menyatakan bahwa Prancis memiliki hak untuk meminta hal tersebut, akan tetapi Portugal sebagai presiden Uni Eropa saat itu juga mempunyai hak memberikan pendapatnya.

Sekretaris Negara Portugal dan Urusan Eropa Manuel Lobo Antunes menegaskan bahwa Turki harus bergabung dengan Uni Eropa, setelah berhasil

menyelesaikan pembicaraan terkait keanggotaan yang cenderung berjalan selama beberapa dekade. Kami pikir penting bahwa Turki bergabung dengan Uni Eropa setelah memenuhi semua kriteria. Tetapi Antunes memberi catatan bahwa perluasan keanggotaan ini kemungkinan ada isu politik lebih dari satu geografis dan sangat sulit untuk menemukan solusi yang jelas dan tegas. (Asbarez, 2007)

## **2. Italia**

Pada 5 November 2008, Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini menyatakan bahwa pemerintah Italia akan mendukung masuknya Turki di Uni Eropa dengan segala upaya. (English Wikipedia, 2008) Pada 13 November 2008, Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi mendesak Uni Eropa mempercepat upaya keanggotaan Turki dan berjanji membantu Ankara dalam proses aksesi. Turki memulai pembicaraan negosiasi keanggotaan pada 2005, namun sejauh ini masih menyelesaikan setengah dari 35 bab prasyarat keanggotaan. (Euro News, 2008)

Berlusconi menegaskan mengenai oposisi yang ditunjukkan oleh beberapa negara-negara anggota Uni Eropa, di mana negara-negara tersebut merupakan negara-negara penting di Uni Eropa. Tetapi Berlusconi yakin akan mampu meyakinkan negara oposisi tentang pentingnya letak strategis Turki bagi Uni Eropa dan sebagai negara yang berbatasan dengan Timur Tengah. (Euro News, 2008)

### **3. Swedia**

Presiden Nicolas Sarkozy membatalkan kunjungannya ke Swedia pada 2 Juni 2009 untuk menghindari pertanyaan terkait keanggotaan Turki di Uni Eropa. Presiden Prancis yang merupakan lawan vokal terkait masuknya Turki ke Uni Eropa, tidak ingin menonjolkan perbedaan pandangannya dengan Perdana Menteri Swedia Fredrik Reinfeldt. Sisi lain dibalik alasan pembatalan kunjungan tersebut karena pada bulan depan (Juli 2009) Stockholm akan segera mengambil alih kepresidenan bergilir di Uni Eropa.

Swedia mendukung perluasan keanggotaan di Uni Eropa, termasuk permohonan keanggotaan Turki di Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Swedia Carl Bildt mengatakan Uni Eropa telah memiliki kepentingan strategis di dalam integrasi Turki ke Uni Eropa. Ia mencoba memperingatkan kembali terhadap penutupan pintu kepada Ankara. (Elitsa Vucheva, 2009)

### **4. Republik Ceko**

Pada tahun 2013, hubungan pemerintah Republik Ceko dan Turki semakin meningkat di bidang bisnis antar perusahaan di kedua negara. Pengembangan investasi dan hubungan dagang antara Republik Ceko dan Turki menjadi topik utama selama pertemuan antara Perdana Menteri Petr Nečas dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoğan dalam kunjungannya ke Republik Ceko selama dua hari.

Pertemuan kedua negara diadakan di Straka Academy, pertemuan berbicara tentang kerjasama ekonomi antara kedua negara. Turki adalah salah satu dari 12 negara di mana pemerintah Republik Ceko memberikan prioritas

strategi ekspor untuk tahun 2012-2020. Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoğan menyatakan bahwa perdagangan antar kedua negara harus ditingkatkan setidaknya lima miliar dolar dalam beberapa tahun berikutnya.

Isu penting selain berkaitan dengan kerjasama ekonomi kedua negara, pertemuan tersebut juga membahas terkait hubungan antara Turki dan Uni Eropa. Turki dan Uni Eropa memulai pembicaraan aksesinya pada tahun 2005. Perdana Menteri Petr Nečas menegaskan bahwa Republik Ceko tetap percaya bahwa Turki harus diberikan kesempatan untuk menjadi anggota penuh Uni Eropa setelah memenuhi semua kriteria standar Uni Eropa. Selain itu, Perdana Menteri Petr Nečas mempertegas bahwa Turki sebagai mitra penting bagi Uni Eropa dan berperan konstruktif dalam kawasan Timur Tengah. (Government of the Czech Republic, 2013)

## **5. Spanyol**

Pada 5 April 2009, Spanyol dan Turki mengadakan pertemuan tingkat tinggi antar kedua negara. Pertemuan tingkat tinggi antara Spanyol dan Turki diselenggarakan di Istanbul, Turki. Perdana Menteri Spanyol José Luis Rodríguez Zapatero mengatakan kepada Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoğan bahwa Spanyol mendukung secara tegas terkait pencalonan Turki masuk Uni Eropa, asalkan memenuhi syarat yang diperlukan.

Selama pertemuan tersebut kedua negara memutuskan untuk meningkatkan hubungan antar keduanya. Komitmen kedua negara untuk bekerjasama dalam memerangi kejahatan terorganisir, terorisme, perdagangan manusia, dan imigran ilegal. Selain itu pembahasan dalam pertemuan tingkat

tinggi kedua negara berkaitan dengan isu-isu mengenai urusan dalam negeri, pertahanan, perdagangan, dan energi terbarukan.

Perdana Menteri Spanyol José Luis Rodríguez Zapatero menegaskan kembali bahwa kita harus membuka pintu bagi Turki untuk masuk dalam integrasi Uni Eropa setelah memenuhi syarat yang diperlukan. Aturan terkait integrasi dalam hal ini permohonan keanggotaan telah ditetapkan dalam serangkaian prosedur dan hukum yang harus dihormati.

Rodríguez Zapatero menambahkan bahwa Komisi akan mengevaluasi setiap laporan dari negara kandidat, kemudian Dewan akan membuat keputusan sesuai dengan laporan dari Komisi, namun saat pembahasan di Dewan ini akan memakan waktu. Rodríguez Zapatero mempertegas bahwa pintu masuk untuk Turki adalah suatu keputusan yang baik bagi Turki dan baik bagi Uni Eropa. (La Moncloa- Gobierno de Espana, 2009)

## **6. Inggris**

Pada 27 Juli 2010, Perdana Menteri Inggris David Cameron berjanji berupaya menjadikan Turki sebagai negara anggota Uni Eropa. Cameron marah ketika proses negosiasi begitu lambat. Pada kunjungan pertamanya sebagai perdana menteri, Cameron mengatakan bahwa Turki bisa menjadi salah satu kekuatan besar Eropa dan membantu Eropa membangun hubungan baik dengan Timur Tengah.

Dalam kunjungannya ke Turki, Cameron diharapkan untuk menyetujui kemitraan strategis baru dengan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdoğan. Sementara dalam pidato Cameron di Parlemen Turki di Ankara,

David Cameron mengatakan bahwa ada keinginan untuk membuka jalan bagi Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa. Kemudian Cameron menegaskan bahwa Turki sebagai negara penting bagi perekonomian, keamanan, dan diplomasi bagi Inggris.

David Cameron mengacu pada upaya mantan Presiden Prancis Jenderal Charles de Gaulle untuk memblokir keanggotaan Inggris pada saat itu dalam *European Economic Community* tahun 1960. Inggris mengetahui bagaimana rasanya ditutup pintu dari integrasi ini. Tapi kami juga tahu bahwa hal-hal itu dapat berubah. Cameron menganalogikan bahwa yang dilakukan Turki kepada Uni Eropa beberapa dekade terakhir ini seperti Turki dapat menjaga *camp* Uni Eropa, tetapi tidak diperbolehkan untuk duduk di dalam tenda Uni Eropa.

Cameron kembali menegaskan bahwa akan tetap mendukung Turki menjadi anggota Uni Eropa dan membuat pengaruh yang lebih besar di atas meja diplomasi Eropa. Cameron menjelaskan bahwa Turki membuka negosiasi akses dengan Uni Eropa pada 2005, namun dianggap tidak mungkin bergabung dalam sepuluh tahun ke depan, sebagian karena kelompok-kelompok oposisi dari negara-negara seperti Prancis.

David Cameron mengatakan kelompok yang menentang keanggotaan Turki di Uni Eropa didorong oleh sikap proteksionisme, nasionalisme yang sempit, dan prasangka. Mereka yang salah paham tentang Islam, mereka tidak melihat perbedaan antara Islam yang sebenarnya dengan Islam yang terdistorsi para ekstrimis. Di tambah bahwa mereka berpikir bahwa nilai-nilai Islam tidak

pernah dapat serasi dengan nilai-nilai budaya, masyarakat, atau agama-agama lain. Sementara itu Cameron memuji demokratis Turki, ia menekankan bahwa Turki harus terus memperbaiki reformasi ekonomi dan politik untuk mempertahankan momentum menuju keanggotaan Uni Eropa. (BBC News, 2010)

#### **D. Posisi Strategis Turki bagi Uni Eropa**

Menurut Jean Asselborn Menteri Luar Negeri Luxembourg dan Urusan Eropa, Uni Eropa membutuhkan mitra strategis seperti Turki untuk sejumlah isu internasional seperti isu migrasi, *counter-terrorism*, *energy security*, ekonomi, perdagangan, dan iklim. (EU-Turkey Intergovernmental Conference, 2015) Turki sebagai mitra strategis untuk membendung instabilitas Timur Tengah ke dalam Uni Eropa setelah meningkatnya aksi terorisme di Eropa pasca peristiwa 9 September 2001. (Sumantri, 2012, hal. 106)

Selain itu, Jean Asselborn menyambut baik dimulainya kembali konferensi tingkat tinggi antara Uni Eropa dan Turki. Jean Asselborn menegaskan bahwa Turki sebagai mitra penting bagi Uni Eropa dalam menjaga stabilitas dan keamanan benua Eropa, sangat disayangkan apabila tidak ada pertemuan tingkat tinggi secara teratur dengan Turki. Hal itu disampaikan oleh Jean Asselborn dalam *EU-Turkey Summit* pada 29 November 2015. (EU-Turkey Intergovernmental Conference, 2015)



#### **E. Keputusan Uni Eropa Terkait Permohonan Keanggotaan Turki Tahun 2005-2016**

Uni Eropa meningkatkan status Turki menjadi ‘negara calon anggota’ pada tahun 2005 sekaligus membuka perjanjian negosiasi keanggotaan. Untuk dapat mencapai keanggotaan penuh, Turki harus melaksanakan 35 bab negosiasi. Tetapi dalam perkembangannya, proses negosiasi akses Turki berjalan sangat lambat. Dari total 35 bab, saat ini Turki baru menyelesaikan 16 bab dari total 35 bab yang diajukan Uni Eropa. Satu bab dari 16 bab negosiasi ditutup sementara waktu. Sementara itu Kroasia yang juga memulai negosiasi akses pada tahun 2005 sama dengan Turki bahkan telah secara resmi memperoleh keanggotaan penuh pada 1 Juli 2013. (Rahim, 2013, hal. 215)

Ketika proses negosiasi yang cukup alot antara Uni Eropa dan Turki, ada beberapa negara anggota Uni Eropa yang memberikan dukungannya agar Turki dapat bergabung dalam integrasi Uni Eropa. Selain itu, Jean Asselborn Menteri Luar Negeri Luxembourg dan Urusan Eropa menyambut baik dimulainya kembali konferensi tingkat tinggi antara Uni Eropa dan Turki. Jean Asselborn menegaskan bahwa Turki sebagai mitra penting bagi Uni Eropa dalam menjaga stabilitas dan keamanan benua Eropa, sangat disayangkan apabila tidak ada pertemuan tingkat tinggi secara teratur dengan Turki. Hal itu disampaikan oleh Jean Asselborn dalam *EU-Turkey Summit* pada 29 November 2015. (EU-Turkey Intergovernmental Conference, 2015)

Sikap Uni Eropa yang kerap menangguhkan beberapa bab dari persyaratan negosiasi dengan Turki dan keputusan beberapa negara anggota

Uni Eropa khususnya oposisi seperti Prancis dan Jerman yang menutup tawaran untuk keanggotaan Turki. (Sumantri, 2012, hal. 123) Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron dalam kunjungannya ke Turki pada 2010 yang menjelaskan bahwa Turki dianggap tidak mungkin bergabung dalam sepuluh tahun ke depan, sebagian karena kelompok-kelompok oposisi dari negara-negara seperti Prancis. Dan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi yang menegaskan mengenai oposisi yang ditunjukkan oleh beberapa negara-negara anggota Uni Eropa, di mana negara-negara tersebut merupakan negara-negara penting di Uni Eropa. (Euro News, 2008)

Hingga tahun 2016, Turki telah mencapai sepuluh tahun dari awal pembukaan negosiasi pada Oktober 2005 sebagai negara kandidat Uni Eropa yang tetap tidak memiliki suatu jadwal pasti mengenai akhir proses keanggotaannya. Terdapat beragam persoalan ke depan untuk proses akses Turki yang tidak seluruhnya berasal dari Turki. Sementara Uni Eropa sendiri cenderung menunjukkan sikap keraguan akan apa yang sebenarnya diinginkan dari hubungannya dengan Turki. (Sumantri, 2012, hal. 121)